BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Laporan KKL

Teknologi informasi dan komunikasi yang berkembang semakin pesat menuntut lembaga-lembaga pemerintahan untuk meningkatkan kinerjanya. Semakin berkembangnya nilai budaya suatu bangsa, maka secara otomatis pola pikir masyarakatnya pun semakin maju. Kemajuan ini tidak hanya terjadi dikota-kota besar, tetapi mulai merambah ke kota-kota kecil. Fenomena yang sedang menjadi *trend* saat ini yaitu penggunaan *e-Government* dalam mendukung kinerja pemerintah. Faktanya yaitu setiap pemerintah daerah memiliki situs masing-masing.

Kabupaten Bogor merupakan salah satu contoh yang sudah memiliki situs sebagai sarana untuk mempermudah masyarakat dalam mendapatkan informasi, mengenai peristiwa yang terjadi maupun kondisi wilayahnya. Adapun bukti pendukung yaitu Keputusan Menteri Komunikasi dan Informasi (Menkominfo) No.57 Tahun 2003 mengenai Panduan Penyusunan Rencana Induk Pengembangan *e-Government* Lembaga dan No.28 Tahun 2006 mengenai Penggunaan Nama Domain go.id untuk situs web resmi pemerintah pusat dan daerah.

Perjalanan pemerintahan dan politik di Indonesia yang selama lima puluh tahun lebih, telah mengalami berbagai macam pengalaman percobaan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah telah dijalani. Adanya otonomi daerah, pemerintah dan masyarakat di daerah dipersilakan mengembangkan kreatifitas dan inovasinya membangun daerah, guna mengimplementasikan makna otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab.

Otonomi daerah didalamnya terdapat visi yang tidak dapat ditinggalkan begitu saja yang dapat dirumuskan dalam tiga ruang lingkup interaksinya yang utama yaitu politik, ekonomi, serta sosial dan budaya. Bidang politik, misalnya otonomi membuka ruang bagi lahirnya kepala pemerintahan daerah yang dipilih secara demokratis. Bidang sosial dan budaya, otonomi daerah harus dikelola sebaik mungkin demi menciptakan dan memelihara harmoni sosial. Bidang ekonomi, otonomi daerah disatu pihak harus menjamin lancarnya pelaksanaan kebijakan ekonomi nasional di daerah, dan dipihak lain terbukanya peluang bagi pemerintah daerah mengembangkan kebijakan regional dan lokal untuk mengoptimalkan pendayagunaan potensi ekonomi di daerahnya.

Otonomi daerah akan memungkinkan lahirnya berbagai prakarsa pemerintah daerah untuk menawarkan fasilitas investasi, memudahkan proses perizinan usaha, dan membangun berbagai infrastruktur yang menunjang perputaran ekonomi di daerahnya. Kini pelaksanaan otonomi daerah dapat didukung dan dipermudah dengan adanya *e-Government*.

Penerapan *e-Government* menjamin ketersediaan data dan informasi, sehingga dapat dimanfaatkan secara baik sebagai bahan penentu dalam rangka kegiatan pembangunan daerah. Fungsi utama dari *e-Government* adalah alat bantu dalam penciptaan perubahan dalam pelayanan dari pemerintahan kepada masyarakat. Disamping kekuatan daya jangkaunya, *e-Government* dianggap mempunyai beberapa manfaat seperti:

1. Memperbaiki kinerja efektifitas dan efisiensi aparatur dalam menjalankan proses pemerintahan,
2. Meningkatkan kontrol, transparansi, dan akuntanbilitas dalam rangka menciptakan *Good Corporate Governance*.
3. Memberdayakan masyarakat dengan menciptakan masyarakat baru yang lebih sejajar dan faham teknologi sehingga mampu mengantisipasi perubahan global.
4. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dari pemerintah kepada masyarakat.

(Badan Pengembangan Sistem Informasi dan Telematika Daerah Provinsi Jawa Barat, 2005:4-5).

Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor mengaplikasikan *e-Government* dalam melaksanakan komunikasi dengan masyarakat melalui situs www.bogorkab.go.id. Komunikasi yang dimaksud yaitu berupa penyampaian Berita kepada masyarakat sebagai laporan hasil kerja. Berita merupakan salah satu rubrik dalam situs www.bogorkab.go.id. Menurut pendapat Tjitrosoewarno (1981:19).

> "Rubrik adalah ruang yang terdapat dalam surat kabar yang memuat isi dan berita, ruangan khusus yang dapat dimuat dengan periode yang tetap dengan hari-hari tertentu atau beberapa minggu sekali, yang membahas masalah atau membuat masalahnya masing-masing sesuai yang ditulis pada rubrik tersebut. Biasanya rubrik akan menempati ruangan khusus yang telah disediakan dalam lembaran surat kabar"(Tjitrosoewarno dalam R.Panudji, 1981:19).

Berdasarkan pengertian di atas, penulis menyimpulkan bahwa rubrik menempati posisi tertentu dalam surat kabar dan sifatnya tetap pada setiap edisi. Hal tersebut akan memudahkan pembaca untuk memilih informasi atau berita yang mereka butuhkan. Manfaat lain yaitu Pemerintah Daerah dapat mengoptimalkan kinerjanya karena masyarakat dapat memantau hasil kerja mereka melalui situs tersebut. Jika terdapat ketidaksesuaian antara berita yang disajikan dengan kenyataan di lapangan, maka masyarakat dapat mempertanyakan hal tersebut dan hal itu juga dapat mempengaruhi penilaian mereka terhadap Pemerintah Daerah.

Situs Kabupaten Bogor berisi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan Kabupaten Bogor yaitu:

1. Berita yang disajikan mengenai berbagai peristiwa serta kegiatan yang terjadi dan dilaksanakan di wilayah Kabupaten Bogor.
2. Situs ini pun menampilkan visi dan misi dari kabupaten bogor
3. Profil Pimpinan daerah berisi mengenai bupati, wakil bupati dan sekertaris daerah.
4. Organisasi daerah berisi mengenai dinas daerah, lembaga teknis, kecamatan, desa dan kelurahan beserta perda.
5. Sistem informasi yang ada didalamnya meliputi managemen arsip daerah, perencanaan pembangunan daerah, georafis daerah, laporan akuntanbilitas intansi, pengelolaan asset daerah, management kependudukan daerah, telematika dan *E-Procurement*.
6. Inovasi yang mencakup edisi tahunan.
7. DPRD menampilkan tentang nama-nama anggota yang termasuk didalamnya.
8. Industrl menampilkan mengenai industrl kecil dan industry besar yang terdapat dikabupaten bogor.
9. Pendidikan menampilkan perguruan tinggi, pendidikan dasar dan menengah beserta pendidikan usia dini yang terdapat di kabupaten bogor.

Masyarakat termasuk salah satu elemen penting dalam suatu negara yang juga berperan sebagai pengontrol arah kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Oleh karena itu masyarakat juga berhak atas transparansi mengenai apa yang telah dikerjakan oleh pemerintahnya. Adanya *e-Government* ini, masyarakat dapat lebih mudah mengakses setiap informasi yang dibutuhkannya.

Penulis tertarik mengangkat judul ini karena *e-Government* sedang menjadi *trend* pada saat ini. Penulis memilih situs Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor sebagai objek penulisan laporan KKL.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis mengambil judul kuliah kerja lapangan, **'Efektivitas Penyampaian Berita Melalui situs www.bogorkab.go.id Di Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor' (**Suatu Studi Pada Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Bogor).

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas untuk memperjelas fokus masalah dalam penulisan ini, penulis menyusun identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kredibilitas komunikator dalam penyampaian Berita melalui situs www.bogorkab.go.id?
2. Bagaimana isi pesan yang disampaikan pada Berita melalui situs www.bogorkab.go.id?
3. Bagaimana media yang digunakan dalam penyampaian Berita melalui situs www.bogorkab.go.id?

1.3 Maksud dan Tujuan Laporan KKL

Maksud dari penulisan Laporan KKL ini adalah untuk mengetahui dan menggambarkan Efektivitas Penyampaian Berita melalui situs www.bogorkab.go.id di Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor, sehingga dapat diperoleh gambaran tentang situs Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor.

Adapun tujuan penulisan ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui kredibilitas komunikator dalam penyampaian Berita melalui situs www.bogorkab.go.id di Pemerintah Kabupaten Bogor.
2. Untuk mengetahui isi pesan yang disampaikan pada Berita melalui situs www.bogorkab.go.id di Pemerintah Kabupaten Bogor.
3. Untuk mengetahui media yang digunakan dalam penyampaian Berita melalui situs www.bogorkab.go.id di Pemerintah Kabupaten Bogor.

1.4 Kegunaan Laporan KKL

Kegunaan penulisan laporan KKL ini adalah:

1. Hasil penulisan ini dapat bermanfaat bagi penulis sebagai salah satu syarat kelulusan dari mata kuliah kerja lapangan pada Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Komputer Indonesia.
2. Secara Teoritis hasil penulisan ini diharapkan dapat memperkaya pengetahuan dibidang Ilmu Pemerintahan terutama mengenai efektivitas penyampaian Berita di Kantor Komunikasi dan Informasi Kabupaten Bogor.
3. Secara Praktis hasil penulisan ini sebagai bahan informasi penyampaian Berita bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor khususnya bagian Komunikasi dan Informasi.

1.5 Kerangka Pemikiran

Secara umum Undang Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah banyak membawa kemajuan bagi daerah dan juga bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat karena Pemerintah Daerah diberi wewenang yang luas untuk mengelola kekayaan daerah guna dimanfaatkan bagi pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah.

Otonomi Daerah dapat diartikan sebagai "hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan"(Widjaja, 2005:151). Tujuan otonomi adalah untuk mencapai efisiensi dan efektivitas dalam pelayanan kepada masyarakat. Tujuan lain adalah menumbuhkan kemandirian daerah dan meningkatkan daya saing daerah dalam proses pertumbuhan.

Pengertian Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah menurut Kartasapoetra adalah, "Pemerintah Daerah adalah penyelenggara pemerintahan di daerah". Dengan kata lain Pemerintah Daerah adalah kemudi dalam pelaksanaan kegiatan Pemerintah Daerah" (Misdyanti dan Kartasapoetra, 1993:17). Sedangkan pengertian Pemerintah Daerah menurut Peraturan Pemerintah (PP) No 84 Tahun 2000 tentang pedoman organisasi perangkat daerah adalah, "Pemerintah Daerah adalah kepala daerah beserta perangkat daerah otonomi yang lain sebagai badan eksekutif daerah"

Berdasarkan definisi di atas, dapat dikatakan bahwa Pemerintah Daerah yang dimaksudkan adalah Pemerintah Daerah dalam arti sempit yang terdiri dari kepala daerah, sekretaris daerah dan dinas-dinas di daerah. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah merupakan suatu sistem yang ada dalam wilayah daerah kabupaten dan bupati kepala daerah sebagai unsur pimpinan penyelenggara pemerintah di daerah.

Suatu instansi pemerintah baik berupa dinas, badan ataupun lembaga pada hakekatnya merupakan seperangkat alat untuk mengeksekusi kebijakan pemerintah atau disebut sebagai birokrasi. Agar lebih mudah memahami arti birokrasi, dikutip dari buku *Birokrasi Indonesia*, Pfifner dan Prestheus memberikan pengertian birokrasi sebagai berikut:

> "Birokrasi merupakan suatu organisasi yang sistematik dari tugas-tugas manusia ke dalam suatu pola tertentu untuk dapat secara efektif mencapai tujuan akhir dari suatu usaha bersama. Birokrasi pemerintahan di organisasi untuk menyelenggarakan urusan-urusan Negara yang peranannya lebih sekedar penggerak administrasi belaka" (dalam Rohayati, 1999:3).

Berdasarkan definisi di atas, penulis dapat mengatakan bahwa birokrasi merupakan bagian dari proses atau tahapan tertentu yang harus dilalui dalam melaksanakan suatu program yang telah dirancang sedemikian rupa sampai akhirnya tercapai tujuan.

> "Posisi birokrasi akan kuat secara politis dikarenakan pentingnya posisi birokrasi itu pula secara politis, peran birokrasi yang dimaksud adalah:
> 1. Berperan dalam proses input, artinya birokrasi dapat menyampaikan pendapatnya kepada legislative untuk dibahas dan dibuatkan regulasinya.
> 2. Berperan dalam proses legislatife, birokrasi memiliki berbagai informasi yang dibutuhkan dalam pengambilan keputusan kepada lembaga legislative menjadikan suatu instansi birokrasi yang terkait dengan pembahasan suatu rancangan keputusan.
> 3. Berperan sebagai interpreter produk legislative, birokrasi dapat melakukan penafsiran, pejabaran dan penjelasan dari sebuah kebijakan atau peraturan.
> 4. Berperan sebagai eksekutor, agar keputusan politik yang dikeluarkan legislative dapat berperan di masyarakat maka birokrasi dituntut untuk dapat mensosialisasikan dan mengimplementasikannya".
>
> (Setiono, 1993:34).

Pendukung kinerja birokrasi agar lebih efektif, kini muncul produk teknologi terbaru dan telah banyak dikembangkan oleh berbagai lembaga termasuk lembaga pemerintahan yaitu internet. Internet adalah jaringan komputer yang terdiri dari berbagai macam ukuran jaringan komputer di seluruh dunia mulai dari PC (*Personal Computer*), jaringan lokal berskala kecil, menengah, dan jaringan utama yang menjadi tulang punggung internet (Suryana, 1998:1-2).

> Kualitas sebuah *situs* dapat dinilai dari berbagai aspek, diantaranya tampilan, kualitas, dan kemutakhiran informasi, kinerja serta fitur-fitur yang disediakan. Jenis implementasi berupa *booklet* biasanya berskala kecil dan kebanyakan aplikasinya tidak memerlukan sumberdaya yang terlalu besar dan beragam. Komunikasi yang timbul dalam tingkatan ini adalah satu arah, dimana pemerintah hanya mempublikasikan data dan informasi agar dapat diakses secara langsung oleh masyarakat dan pihak-pihak lain yang berkepentingan (Andrianto,2007:47).

Penyediaan Berita melalui Situs www.bogorkab.go.id di Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor, ke dalam produk *e-Government*. *e-Government* adalah penggunaan teknologi informasi yang dapat meningkatkan hubungan antara Pemerintah dan pihak-pihak lain (Indrajit, 2002:3)".

Efektivitas memiliki arti berhasil atau tepat guna. Efektif merupakan kata dasar, sementara kata sifat dari efektif adalah efektivitas. Menurut Susanto, "efektivitas merupakan daya pesan untuk mempengaruhi atau tingkat kemampuan pesan-pesan untuk mempengaruhi"(Susanto, 1975:156). Berdasarkan definisi tersebut, penulis beranggapan bahwa efektivitas bisa tercipta jika pesan yang disampaikan dapat mempengaruhi khalayak yang diterpanya.

Effendy dalam bukunya yang berjudul *Ilmu, Teori dan Filsafat Komunikasi*, mengemukakan faktor-faktor penunjang komunikasi efektif dari beberapa ahli komunikasi. Hal yang pertama, yaitu komponen komunikator. "Untuk melaksanakan komunikasi efektif, terdapat dua faktor penting pada diri komunikator yakni kepercayaan pada komunikator (*source credibility*) dan daya tarik komunikator (*source attractiveness*)"(Effendy, 2003:43).

Menurut Effendy (1989:15) mengemukakan bahwa "kita memerlukan strategi dan perencanaan komunikasi yang bertujuan untuk mendefinisikan isi pesan". Sedangkan menurut Alo ada beberapa jenis pesan, antara lain "*information message* (pesan yang mendukung informasi) dan *motivasional message* (pesan yang berusaha mendorong)" (Alo,1997:20)

Agar tujuan pemerintahan tercapai, setiap badan pemerintahan perlu melakukan aktifitasnya secara lebih efektif dan efisien agar tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai. Efektivitas diartikan sebagai tindakan dan kegiatan dalam mencapai tujuan yang ditetapkan sebelumnya oleh pemerintah serta sangat penting peranannya di dalam setiap badan pemerintahan dan berguna untuk melihat perkembangan dan kemajuan yang dicapai oleh suatu badan pemerintahan itu sendiri.

Berdasarkan pengertian di atas, penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa efektivitas berhubungan dengan tujuan pemerintah, suatu tujuan pemerintah ditetapkan sebelum Pemerintah tersebut melakukan kegiatan usahanya.

Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor tentunya harus memiliki kredibilitas sebagai komunikator yang memberikan pesan (*message*) berupa informasi-informasi mengenai peristiwa dan kegiatan yang terjadi di wilayah Bogor dan disajikan dalam Berita melalui situs www.bogorkab.go.id. Internet sendiri berfungsi sebagai alat pemancar (*transmitter*) yang menyebarluaskan informasi yang disampaikan agar bisa diakses oleh khalayak luas. Tetapi sinyal dari pemancar tersebut tidak selalu baik, terkadang ada saja gangguan (*noise source*) koneksi internet. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor diantaranya yaitu cuaca yang tidak selalu stabil sehingga sinyal tersebut tidak dapat ditangkap oleh penerima (*receiver*). Tetapi jika sinyalnya bagus maka penyampaian pesan bisa lancar dan dapat diterima dengan baik oleh khalayak yang dituju (*destination*) dimana khalayak tersebut mengalsesnya.

Penulis mengajukan proposisi "Efektivitas penyampaian Berita melalui situs www.bogorkab.go.id di Pemerintah daerah Kabupaten Bogor berdasarkan kredibilitas komunikator, isi pesan, dan media". Dalam memperjelas proposisi diatas, penulis mengemukakan definisi operasional sebagai berikut:

1. Efektivitas adalah suatu kondisi dimana segala sesuatunya berjalan sesuai dengan harapan dan target awal. Hal tersebut dapat di lihat melalui operasionalisasi sebagai berikut:
   a. Kredibilitas komunikator adalah wibawa dan sikap yang dapat dipercaya dari seorang penyampai pesan di Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Bogor.
      1. *likeability*
         likeability merupakan penerimaan masyarakat terhadap Komunikator. Dalam hal ini yang ini menjadi komunikatornya yaitu Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor khususnya bagian pengelolaan situs web.
      2. Itikad baik
         Itikad yang baik dari seorang komunikator dalam menyampaikan pesan akan berbuah baik pula dari penerimaan masyarakat yang berujung kebehasilan. Dalam hal ini yang menjadi komunikatornya yaitu Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor khususnya bagian pengelolaan situs web.
      2. Dapat dipercaya (Kredibilitas)
         Yaitu suatu sikap dimana, apa yang disampaikan oleh komunikator tersebut tidak diragukan oleh komunikan. Dalam hal ini yang menjadi komunikatornya yaitu Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor khususnya bagian pengelolaan situs web.
      3. Kecakapan atau kemampuan (Keahlian)
         Yaitu kemampuan komunikator dalam membawa dirinya terutama pada saat menyampaikan pesan. Dalam hal ini yang menjadi komunikatornya yaitu Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor khususnya bagian pengelolaan situs web.
   b. Isi pesan adalah materi yang disampaikan oleh komunikator kepada komunikan baik secara primer maupun sekunder. Isi pesan dalam Berita yaitu menyangkut berbagai hal yang terjadi di Kabupaten Bogor.
      1 Penggunaan bahasa
         Penggunaan bahasa sangat penting dalam menyampaikan isi pesan karena masyarakat atau komunikan bisa mencerna apa yang mereka terima bila sesuai dengan bahasa yang mereka mengerti.
      2 Format isi pesan
         Penyajian format isi pesan seperti penggunaan huruf yang sesuai, tata letak dan dukungan gambar perlu diperhatikan agar komunikan tertarik dan tidak bosan dalam menerima pesan tersebut.
   c. Media adalah alat yang digunakan oleh Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Bogor untuk menyampaikan pesan secara sekunder melalui situs www.bogorkab.go.id. Menurut Julius Onggo media itu menghasilkan:
      1. Komunikasi Konstan
         Internet bagaikan satpam atau sekretaris yang tidak pernah tidur selama 24 jam x 7 hari dengan potensi target publik seluruh dunia.
      2. Respons yang cepat
         Internet memungkinkan Pemerintah Daerah merespon secara cepat dan serta merta semua permasalahan dan pertanyaan dari masyarakat
      3. Pasar Global
         Internet telah menutup jurang pemisah geografis (kecuali psikologis) setelah Anda terhubung ke dunia *online*.
      4. Interaktif
         Pemerintah Daerah dapat memperoleh *feedback* dari masyarakat atau pengunjung situs. Dengan demikian, Pemerintah Daerah bisa tahu keinginan masyarakat sehingga tidak perlu lagi menebak-nebak.
      5. Komunikasi 2 arah
         Internet memungkinkan terjadinya komunikasi arah, yang tidak dapat dilakukan langsung oleh media *offline*.
      6. Hemat
         Biaya yang dikeluarkan jauh lebih hemat bila dibandingkan jika harus menyampaikan berita dalam bentuk media cetak.
   d. Berita yang konkrit dan dapat dipercaya oleh khalayak masyarakat adalah berita yang benar-benar akurat dan dapat dipertanggungjawabkan oleh Komunikator Dinas Komuniikasi dan Informasi Kabupaten Bogor.
2. Penyampaian Berita melalui situs adalah suatu peroses dimana berita dari berbagai daerah dirangkum dalam suatu rubrik dan disampaikan melalui situs.
3. Situs merupakan sebuah lokasi di internet yang memiliki akses ke semua pengguna internet dan dapat saling bertukar dokumen dengan cara menghubungkan satu sama lain dalam suatu jaringan yang saling terhubung melalui jaringan komunikasi seperti kabel telepon.

Berikut ini merupakan bagan untuk memperjelas kerangka fikiran yang telah diuraikan di atas:

Gambar 1.2
Model Kerangka Pikiran

1.6 Metode dalam Laporan KKL

1.6.1 Metode Penulisan

Metode penulisan yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, dimana data-data yang diperoleh dideskripsikan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan memanfaatkan teknologi informasi atau internet, sedangkan untuk pengumpulan data di lapangan dilakukan pengamatan langsung di lapangan (observasi) serta melakukan wawancara sebagai pendukung.

Metode penulisan deskriptif menurut Mohammad Nasir adalah suatu metode dalam memilih suatu kelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang (Nasir, 1998:5).

1.6.2 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan yaitu :

a. Wawancara (*Interview*)

Yaitu melalui tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung yang dilakukan oleh penulis atau pewawancara kepada narasumber. Penulis menggunakan metode wawancara karena penulis bisa mendapatkan jawaban secara langsung dengan narasumber bapak Abdul Latif Amd, selaku Seksi pengelolaan situs web Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor.

b. Studi Pustaka

Yang dimaksud studi pustaka adalah pengambilan data yang diperoleh melalui literatur atau buku yang tersedia yang berhubungan dengan komunikasi politik khususnya Efektivitas Penyampaian Berita Melalui Situs www.bogorkab.go.id Di Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor.

1.7 Lokasi dan Waktu KKL

Penulis melaksanakan KKL ini di Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Bogor yang beralamatkan di Jalan Tegar Beriman Telp.(021)8758605, 8751929 Fax.(021)8758605 Cibinong-16914. Penulisan ini dilakukan selama ± 6 bulan dimulai pada bulan Juni sampai November 2010.

Tabel 1.1
Jadwal Kegiatan KKL

No	Kegiatan	Tahun 2010					
		Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov
1.	**Tahap Persiapan**						
	a. Observasi lokasi Penulisan.						
	b. Pengajuan Judul						
2.	**Tahap Pelaksanaan**						
	a. Pelaksanaan KKL						
	b. Wawancara						
	c. Studi Kepustakaan						
3.	**Tahap Akhir**						
	a. Penyusunan Laporan Penulisan						
	b. Pengumpulan Laporan KKL						